BAB III

KONDISI SULAWESI UTARA PADA TAHUN 1917-1923

A. Geografis Sulawesi Utara Tahun 1917-1923

Sulawesi Utara merupakan suatu provinsi yang terdiri dari berbagai macam daerah. Dalam perjalanan hidup Maria Walanda, terdapat beberapa wilayah yang tidak dapat dilepaskan dari kisah hidupnya, salah satunya tempat kelahirannya yaitu di Desa Kema. Kema merupakan nama dari satu desa yang berada dalam cakupan Kabupaten Minahasa. Kema terletak di pesisir timur laut dari daerah Minahasa, oleh karena itu mayoritas pekerjaan warganya ialah nelayan dan pedagang. Saat masa kelahiran Maria Walanda, Kema masih merupakan suatu desa kecil dan terpencil, namun sudah ada masyarakat yang tinggal dan menetap di daerah ini. Suasana desanya pun relatif sepi dan sunyi, hal tersebut semakin terasa di malam hari. Salah satu yang membuat suasana desa ini ramai waktu itu sekaligus menjadi hiburan masyarakat ialah datangnya kapal-kapal ke pelabuhan Kema, baik itu kapal pedagang maupun kapal kolonial Belanda.[1]

Kema memiliki pelabuhan tradisional yang di masa kolonial pelabuhan Kema merupakan pelabuhan terbesar kedua setelah pelabuhan Manado di Sulawesi Utara. Kema menjadi alternatif pelabuhan kapal pedagang jika pelabuhan Manado terkena badai angin barat. Namun, pesona pesisir Kema berubah menjadi mencekam dan berbahaya apabila musim Kemarau tiba. Jika

[1]Ivan R.B. Kaunang, *Jangan Lupakan PIKAT Anak Bungsuku,* (Papua: Penebit Aseni,2017),p.40.

musim Kemarau tiba, banyak timbul kolam-kolam kecil di sekitar pesisir Kema yang menyebabkan berkembang biaknya nyamuk Malaria.

Sekarang Kema berstatus sebagai kecamatan dalam lingkup daerah Kabupaten Minahasa Utara, Provinsi Sulawesi Utara. Pelabuhan Kema pun masih aktif sampai saat ini, namun hanya untuk pelabuhan perikanan saja. Kema terbagi juga menjadi beberapa desa, yaitu Kema I, Kema II, dan Kema III. Desa Kema I dihuni mayoritas masyarakat Pribumi. Desa Kema II disebut juga kampung Belanda atau Kampung Borgo, karena di banyak warga di desa ini yang menikah dengan orang Belanda saat zaman kolonial dahulu. Masyarakat Kema II juga masih menggunakan nama *fam* atau *marga* Belanda hingga saat ini, misalnya nama *fam* Engelen, Van Sloys, Van den Broek, Jacobs, Pieters, dan sebagainya. Sedangkan, Kema III disebut juga kampung Islam, karena mayoritas penduduknya beragama Islam.[2]

Selanjutnya, kota yang menjadi saksi perjuangan Maria Walanda ialah Kota Manado. Maria Walanda menginjakan kakinya ke kota ini ketika Maria harus ikut suaminya yang mendapatkan tugas untuk mengajar di sebuah sekolah Belanda. Saat itu Manado merupakan ibukota dari beberapa wilayah provinsi saat ini. Wilayah Karesidenan Manado meliputi Sulawesi Utara Sulawesi Tengah, Kepulauan Sangihe, Talaud dan pulau di sekitarnya.

[2] Arie J. Wawointana, *Potret Sulawesi Utara*, (Jakarta, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1992), p,23.

Karesidenan Manado dipimpin oleh seseorang dengan jabatan Residen. Pada awal pembentukannya, Manado dipimpin oleh Residen J. Wenzel dengan asistennya Residen Minahasa J.F Roos.

Kota Manado terlihat berbeda dengan kota lainnya karena statusnya sebagai ibukota. Saat itu kota Manado telah tertata dengan rapih dengan keberadaan gedung-gedung pemerintahan dan berbagai fasilitas pendukungnya. Selain itu, Kota Manado juga telah dilengkapi berbagai macam fasilitas publik seperti kantor pos, rumah sakit, pos polisi, penjara kota, bahkan pelabuhan. Di kota ini Maria Walanda merasa mimpinya semakin dekat untuk dapat memperjuangkan kaum perempuan. Karena di kota ini banyak sekali orang-orang berpendidikan tinggi dan pejabat-pejabat pemerintahan. Hal tersebut memberikan harapan kepada Maria bahwa peluang memperjuangkan mimpinya terbuka lebar.

Hal lain yang membuat Maria Walanda semakin percaya diri untuk mewujudkan mimpinya adalah bentuk pemerintahan dari Kota Manado yang bersifat terbuka dan demokratis. Berbeda dengan daerah di sekitar Manado yang saat itu masih banyak yang berbentuk Kerajaan yang kental dengan peraturan. Karena saat itu Kota Manado merupakan daerah Kerasidenan yang dipegang langsung oleh Belanda, maka Kota Manado tidak mengenal sistem kerajaan. Semua jalannya pemerintahan berdasarkan aturan Pemerintah Hindia-Belanda yang terbuka dan tidak terikat dengan adat istiadat kerajaan.

Maria Walanda merasa bahwa inilah kesempatan dirinya untuk dapat memperjuangkan nasib kaum perempuan di desa yang harus mendapatkan pendidikan yang setara dengan pria dan tidak terikat dengan adat yang membelenggu mimpi seorang perempuan.

B. Kondisi Perempuan Sulawesi Utara Tahun 1917-1923

Pada rentang tahun 1917-1923 Kondisi kaum perempuan di Minahasa hampir sama dengan kondisi perempuan di daerah lainnya di Indonesia yang saat itu masih dijajah oleh Belanda. Dari segi pendidikan, bagi kaum pribumi terjadi perbedaan antara perempuan dan laki-laki. Karena perempuan pribumi Minahasa hanya dapat memasuki sekolah rendah atau sekolah melayu yang lama sekolahnya hanya tiga tahun. Setelah itu perempuan Minahasa hanya sibuk membantu orang tua di rumah sambil menunggu dilamar oleh seorang pria. Saat itu pengaruh adat pun masih sangat kuat bahwa kaum perempuan tidak boleh mendapatkan pendidikan tinggi seperti laki-laki.[3]

Namun karena pengaruh budaya Belanda yang cukup kental saat itu, perempuan di Minahasa sudah mendapatkan kebebasan untuk dapat berinteraksi dengan kaum pria, baik itu di luar rumah, di sawah, bahkan di beberapa tempat semacam pesta. Selain itu, yang menjadi permasalahan perempuan Minahasa saat itu ialah dinikahkan pada usia masih sangat muda.

---

[3] JJ. Rizal, Maria Walanda Maramis (1872-1924) *Perempuan Minahasa Pendobrak Adat dan Pemberontak Nasionalisme,* dalam "Merayakan Keberagaman", Jurnal Perempuan Vol. 54, Jakarta, Yayasan Jurnal Perempuan, p 88.

Hal tersebut tidak dapat dihindari, karena bagi perempuan Minahasa saat itu setelah bersekolah di Sekolah Melayu yang dilakukannya ialah hanya menunggu untuk di lamar oleh seorang Pria.

Sehingga yang terjadi adalah perempuan Minahasa tumbuh dewasa tanpa dibekali ilmu yang mumpuni dan kesibukan. Sehingga Maria Walanda pun melihat bahwa musuh terbesar bagi perempuan Minahasa ialah perkembangan watak dan kebajikan. Karena telah hilang kesempatan bagi perempuan Minahasa untuk mendapatkan pengetahuan yang dapat membuat mereka dapat menentukan arah hidup dengan bijak dan meraih kebahagiaan. Menurut Maria Walanda saat itu cara untuk dapat mengubah pola pikir dan adat yang telah berlangsung cukup lama tersebut ialah melalui adanya nilai baru melalui pendidikan.

C. Kondisi Sosial Sulawesi Utara Tahun 1917-1923

Konflik pun selalu terjadi antara pemerintahan Hindia Belanda dengan berbagai macam pihak, baik itu konflik dengan kerajaan Belanda maupun dengan Bangsa Indonesia. Pada tahun 1918 jabatan Gubernur Jendral Hindia dijabat oleh Van Limburg Stirum yang dikenal sebagai seseorang yang menghargai perkembangan yang terjadi di Indonesia. Van Limburg mencoba mengatasi pemberontakan di masyarakat dengan cara *soft power* berupa kebijakan yang dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan Belanda dan masyarakat pribumi. Dalam suatu catatan arsip milik seorang warga Belanda yang bekerja di Indonesia yaitu A.M. Joekes mengatakan bahwa Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum ialah *een staatsman van grote stijl*

(negarawan dengan citra tinggi), yang telah menunjukkan kepemimpinan yang berhasil dalam suatu periode perkembangan yang pesat.[4]

Pada masa ini banyak terjadi konflik sosial berupa kelaparan dan kemiskinan di Masyarakat. Saat mulai terlihat sekali perbedaan yang mencolok antara Masyarakat Eropa dan Pribumi. Hingga saat itu banyak pemberontakan petani di berbagai wilayah jajahan Hindia-Belanda seperti di Cimareme (1918), Jambi (1916), Pasarrebo (1916), dan di berbagai daerah lainnya.[5]

Gubernur Jenderal Van Limburg Stirum mencoba menghadapi suasana keresahan di tengah masyarakat dengan mencoba bersikap sangat toleran terhadap perkembangan di Indonesia. Van Limburg Stirum menjanjikan akan mengadakan komisi perubahan yang akan meninjau kekuasaan Dewan Rakyat dan struktur administrasi pemerintah Hindia Belanda. Dengan kebijakan tersebut Van Limburg Stirum terciptalah hubungan yang harmoni antara pemerintah Hindia Belanda dengan para pimpinan pribumi. Namun, disisi lain kebijakan tersebut ditentang oleh pihak kerajaan Belanda.

Disisi lain, kondisi perekonomian Hindia-Belanda pada semakin tidak stabil. Ditambah dengan kondisi politik pada pemerintahan Hindia-Belanda menjadi goyah ketika jabatan Gubernur Jenderal dipegang oleh Fock yang dikenal dengan sifatnya yang reaksioner.

---

[4]Francien van Anrooij, *De Koloniale Staat (Negara Kolonial) 1854-1942,* diterjemahkan Nurhayu W. Santoso dan Susi Moeimam, (Deen Haag: Nationaal Archief, 2014),p.138.

[5]Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia Jilid V, (Jakarta:Balai Pustaka, 2010),p.59.

Pemerintahan Fock dipaksa harus dapat menaikkan pemasukan negara dan melakukan penghematan akibat banyaknya pengeluaran kerajaan Belanda untuk kebutuhan semasa perang dunia ke 1. Karena sifatnya yang reaksioner, Fock mengambil kebijakan dengan menaikkan pajak terhadap penduduk Jawa dan Madura sebesar 40%. Kebijak tersebut menimbulkan reaksi mogok kerja diberbagai instansi pemerintah, misalnya pegadaian dan pegawai kereta api.[6]

Fock tidak menyadari bahwa kebijakannya tersebut semakin menimbulkan perkembangan kekuatan rakyat yang semakin berkembang. Hingga akhirnya mulai timbul gerakan radikalisasi pergerakan nasional dalam Dewan Rakyat. Dalam suatu catatan arsip milik seorang warga Belanda yang bekerja di Indonesia yaitu A.M. Joekes mengatakan Gubernur Jenderal Fock dianggap merupakan seseorang yang telah merugikan kesehatan dan pendidikan masyarakat. Selain itu, dalam situasi mogok kerja, Ia kurang memberi perhatian yang cukup terhadap posisi ekonomi dari para pekerja Indonesia. Menurut Joekes Undang-Undang Reformasi Pemerintahan (*Wet op de Bestuurshervorming)* dan Undang-Undang Tata Negara (*Wet op Staatsinrichting)* yang diberlakukan pada masa pemerintahan Fock lebih condong mendorong desentralisasi pegawai daripada hak ikut bicara. Hal inilah salah satu pemicu yang semakin memperkeruh keadaan saat itu.[7]

---

[6]Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia Jilid V, (Jakarta:Balai Pustaka, 2010),p.61.

[7]Francien van Anrooij, *De Koloniale Staat (Negara Kolonial) 1854-1942,* diterjemahkan Nurhayu W. Santoso dan Susi Moeimam, (Deen Haag: Nationaal Archief, 2014),p.138.

Dalam bidang pendidikan, rentang tahun 1917 sampai dengan tahun 1923 Sulawesi Utara masih dalam wilayah jajahan Kerajaan Belanda. Karena hal tersebut, sistem pendidikan di Sulawesi Utara masih menggunakan sistem pendidikan Hindia Belanda. Berbicara pendidikan masih erat kaitannya dengan politik, karena sistem pendidikan erat kaitannya dengan kebijakan politik. Saat itu, Belanda menggunakan strategi politik etis dalam menjajah Bangsa Indonesia. Politik etis biasa juga disebut dengan politik balas budi atau politik pertanggung jawaban, artinya pihak Belanda merasa memiliki kewajiban moral untuk mengangkat derajat penduduk pribumi. Bangsa Belanda merasa bahwa mengangkat derajat pribumi merupakan panggilan Tuhan dan merupakan bagian dari kesusilaan. Selanjutnya, bangsa Belanda merasa bahwa rakyat pribumi juga telah membantu mengisi kas negara Belanda. Hal inilah yang mendasari Belanda untuk memperhatikan kesejahteraan rakyat pribumi, kemudian pihak Belanda mengenalnya dengan tiga slogan yaitu irigasi, edukasi, dan emigrasi.[8]

Pengaruh politik etis saat itu sangat kuat meskipun hanya perhatian setengah terhadap rakyat Indonesia. Namun, saat itu pihak Belanda mulai mengizinkan rakyat pribumi untuk belajar Bahasa Belanda. Selain itu, Pihak Belanda juga mulai mengubah sistem pendidikan di Indonesia agar bisa bersifat paralel atau berkelanjutan seperti di Eropa.

---

[8]Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru: Sejarah Pergerakan Nasional dari Kolonialisme sampai Nasionalisme*, (Yogyakarta: Ombak, 1988),p.36.

Sehingga pada tahun 1914 sekolah sekolah kelas satu diubah menjadi sekolah-sekolah *Hollandsch-Inlandsche School*, meskipun tetap saja HIS hanya diperuntukan untuk golongan pribumi kelas atas. Selanjutnya, setelah lulus dari HIS, pihak Belanda membuat sistem agar siswa dapat melanjutkan ke MULO (*Meer Uitgebreid lager onderwijs*) kini setingkat dengan SMP. Namun, tetap saja MULO hanya diperuntukan bagi pribumi golongan kelas atas, orang-orang cina dan Eropa. Selajutnya, pada tahun 1919 Pemerintah Belanda kembali membuat sistem pendidikan lanjutan setelah MULO yaitu dengan mendirikan AMS (*Algemeene middelbare scholen*) atau setara dengan SMA.[9]

Untuk kalangan rakyat pribumi biasa, pada tahun 1907 pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah desa (*desascholen* atau *volksscholen*) atau disebut juga sekolah rakyat. Sekolah tersebut merupakan sekolah yang biayanya ditanggung siswa sendiri. Di sekolah tersebut diterapkan masa pendidikan tiga tahun dan mata pelajarannya hanya sebatas membaca, berhitung, dan keterampilan praktis. Bahasa pengantarnya pun hanya menggunakan bahasa daerah setempat bukan bahasa Belanda. Data menunjukkan pada tahun 1912-1930 telah berdiri 9.600 sekolah dan desa dan lebih dari 40% anak-anak Indonesia yang berusia 6 sampai 9 tahun sekolah di sekolah tersebut. Saat itu banyak masyarakat Indonesia tidak tertarik memasukkan anaknya ke sekolah yang tingkatnya lebih tinggi karena tidak sanggup untuk membayar biayanya.[10]

---

[9]M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, penerjemah Satrio Wahono dkk, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta, 2007), p. 333.

[10]M.C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2004*, diterjemahkan penerjemah Satrio Wahono dkk,, (Jakarta: Serambi Ilmu Semesta,2007), p. 335.

Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa strategi politik etis dari Belanda memang memberikan pengaruh terhadap rakyat pribumi dari segi pendidikan. Selain menjajah rakyat pribumi, Belanda juga sadar harus memberikan balas budi kepada rakyat pribumi dengan menyediakan fasilitas pendidikan. Namun, hal tersebut terkesan "setengah hati", karena tak dapat dipungkiri meskipun sudah terdapat fasilitas pendidikan, tetapi akses rakyat pribumi untuk mendapatkan pendidikan masih cukup sulit. Sebesar apapun usaha rakyat pribumi untuk dapat sejajar dengan Bangsa Belanda selalu mendapatkan hambatan, terlebih faktor diskriminasi rasial masih sangat kental. Disisi lain, ada juga rakyat pribumi yang mempunyai pemikiran yang terbuka dan mempunyai jangkauan akses terhadap pendidikan meskipun hanya tingkat rendah, namun mempunyai gagasan yang tinggi untuk dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat pribumi melalui pendidikan. Salah satunya ialah Maria Walanda yang mempunyai gagasan untuk dapat memajukan kaum perempuan di Minahasa agar dapat akses terhadap pendidikan dan mempunyai kemampuan tanpa diskriminasi gender dan rasial.